



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERPIK**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **756418**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.210.000.000**

1. Tanah Seluas 2550 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 3120 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 4778 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 610.000.000
5. Tanah Seluas 8305 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 3525 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
7. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
8. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 93.100.000**

1. MOTOR, HONDA DIB02NI3L2 /SPD MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.400.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
3.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	54.265.125
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.395.865.125
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.195.865.125

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.